



RENCANA KERJA TAHUN 2025

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SAMBAS**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025. Rencana kerja tersebut sebagai acuan dan pedoman bagi Badan atau Dinas atau Kantor atau Perangkat kerja di lingkungan Kabupaten Sambas dalam merencanakan dan melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SAMBAS



dr. I KETUT SUKARJA

Pembina Utama Muda

NIP. 19651010 199509 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
LAMPIRAN	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	43

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	59
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	61

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH	71
--------------	----

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian	111
5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan	111
5.3 Rencana Tindak Lanjut	112

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	11
Tabel T-C.30	22
Tabel T-C.31	33
Tabel T-C.32	44
Tabel T-C.33	62

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SK KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 329/ DISKUMINDAG/2024
TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan yang secara eksplisit menetapkan kebijakan-kebijakan prioritas sebagai acuan dalam melaksanakan pokok fungsi dinas, sehingga target kinerja yang telah direncanakan didalam Renstra dapat tercapai dengan baik. Renja juga diharapkan sebagai koreksi apabila terjadi perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu untuk ditindaklanjuti sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis.

Rencana kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target dan realistis. Oleh karena itu dalam rencana kinerja ini akan mencantumkan Program dan Kegiatan yang terperinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-

langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala OPD, untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasikan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas 2025. Proses penyusunan Renja sesuai dengan bahan

musrenbang RKPD Kabupaten Sambas tahun 2024 yang akan mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas tahun 2021-2026 sehingga akan memudahkan didalam mengukur target kinerja tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan dari Rencana Kerja OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2023 adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Sambas diantaranya :

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 1.2.2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421).

- 1.2.3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 1.2.4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.2.5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- 1.2.6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 1.2.7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 1.2.8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 1.2.9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 1.2.10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
- 1.2.11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
- 1.2.12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 1.2.13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.2.14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 1.2.15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);

- 1.2.16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
- 1.2.17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 14);
- 1.2.18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
- 1.2.19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19);
- 1.2.20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4);
- 1.2.21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);
- 1.2.22. Peraturan Bupati Sambas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 83);
- 1.2.23. Peraturan Bupati Sambas Nomor 329 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas untuk satu tahun mendatang. Secara rinci maksud dari penyusunan Renja PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- 1.3.2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2023.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah untuk perencanaan, pengembangan, penumbuhan dan peningkatan dibidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan melalui tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang ingin dicapai selama 1 tahun serta mengukur kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam mendukung Pembangunan Daerah.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini juga terdapat informasi-informasi yang memudahkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi tentang :

- 1.1) Latar belakang
- 1.2) Landasan Hukum,
- 1.3) Maksud dan Tujuan,
- 1.4) Sistematika Penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.

- 2.1) hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun-2) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja OPD Tahun-Tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan

- 2.1.1) Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu
- 2.2) Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3) Isu – isi penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
- 2.4) Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN berisi tentang :

- 3.1) Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2) Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3) Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- 5.1) Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian
- 5.2) Kaidah – Kaidah Pelaksanaan
- 5.3) Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu merupakan evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 yang kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 83 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, meliputi kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024, serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2021-2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas melaksanakan program dan kegiatannya.

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/ kendala yang menyebabkan target tidak tercapai.

Adapun Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 Dinas koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sambas dapat dilihat Pada Tabel T-C.29 dibawah ini :

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Sambas**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Terget dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023 (DPA)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	300	300,00
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	14 dokumen	64 dokumen	14 dokumen	4 dokumen	28,57	14 dokumen	82	585,71
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	64 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00	4 dokumen	72	1800,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen		1 dokumen	1	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen		1 dokumen	1	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen		1 dokumen	1	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen		1 dokumen	1	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen		1 dokumen	1	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	0 dokumen	5 dokumen	0 dokumen		5 dokumen	5	100,00

B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	17 dokumen	108 dokumen	17 dokumen	1 dokumen	5,88	17 dokumen	126	741,18
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/ Bulan	96 orang/ Bulan	35 orang/ Bulan	35 orang/ Bulan	100,00	35 orang/ Bulan	166	474,29
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	7 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	9	900,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 laporan	0 laporan	1 laporan	0 laporan		1 laporan	1	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	2 laporan	0 laporan	2 laporan	0 laporan		2 laporan	2	100,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	0 dokumen		2 dokumen	2	100,00
C	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	40 orang	0 orang	40 orang	0 orang		41 orang	41	102,50
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	0 unit	2 unit	0 unit		2 unit	2	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	0 Paket	1 Paket	0 Paket		1 Paket	1	100,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen		4 Dokumen	4	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	0 orang	5 orang	1 orang		7 orang	8	160,00
D	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit organisasi yang dilayani pengadministrasian umumnya	7 unit organisasi	21 unit organisasi	7 unit organisasi	7 unit organisasi	100,00	7 unit organisasi	35	500,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	10	1000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	9	900,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6 Paket	1 Paket	0 Paket	-	1 Paket	7	700,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	9	900,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	9	900,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 dokumen	175 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	100,00	25 dokumen	225	900,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 laporan	1.356 laporan	85 laporan	199 laporan	234,12	90 laporan	1.645	1935,29

E	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit organisasi yang disediakan barang penunjang urusan pemerintah daerah	7 unit organisasi	21 unit organisasi	7 unit organisasi	7 unit organisasi	100,00	7 unit organisasi	35	500,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	8 unit	1 unit	2 unit	200,00	unit	10	1000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	0 unit	1 unit	unit		2 unit	2	200,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	57 unit	10 unit	2 unit	20,00	10 unit	69	690,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	24 unit	2 unit	2 unit	100,00	2 unit	28	1400,00
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	2 unit	1 unit	unit		1 unit	3	300,00
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	0 unit	1 unit	unit		1 unit	1	100,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0 unit	1 unit	unit		1 unit		0,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	0 unit	2 unit	unit		2 unit	2	100,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0 unit	1 unit	unit		1 unit		0,00
F	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit organisasi yang disediakan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	7 unit organisasi	21 unit organisasi	7 unit organisasi	7 unit organisasi	100,00	7 unit organisasi	35	500,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	5	500,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	5	500,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	2 laporan	1 laporan	laporan	-	1 laporan	3	300,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	5	500,00
G	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	300 %	100 %	100 %	100,00	100 %	500	500,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	3 unit	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	5	500,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	3 unit	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	5	500,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 unit	125 unit	34 unit	34 unit	100,00	34 unit	193	567,65
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 unit	0 unit	5 unit	0 unit		5 unit	5	100,00
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	0 unit	1 unit	unit		1 unit	1	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	8	800,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	47 unit	18 unit	18 unit	100,00	13 unit	78	433,33

II	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase pelayanan izin KSP/USP	15,9 %	0 %	15,9 %	%		18,18 %	18	114,34
A	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi	15,38 %	0 %	15,38 %	%		17,94 %	18	116,64
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit Usaha	0 Unit Usaha	6 Unit Usaha	Unit Usaha		7 Unit Usaha	7	116,67
B	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin pembukaan kantor pusat kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam	20 %	0 %	20 %	%		20 %	20	100,00
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	0 Unit Usaha	1 Unit Usaha	Unit Usaha		1 Unit Usaha	1	100,00
III	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	5,56 %	55 %	5,56 %	33,03 %	594,06	6,11 %	95	1700,54
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	- Persentase Koperasi, Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang dilakukan pengawasan - Persentase Koperasi, Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang dilakukan pemeriksaan	3,24 % 2,31 %	44 % 12 %	3,24 % 2,31 %	19,17 % 13,25 %	591,67 573,59	3,62 % 2,49 %	67 27	2053,09 1187,01
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Koperasi	215 Koperasi	14 Koperasi	88 Koperasi	628,57	10 Koperasi	313	2235,71
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	10 Koperasi	54 Koperasi	10 Koperasi	59 Koperasi	590,00	11 Koperasi	124	1240,00
IV	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	30,76 %	0 %	30,76 %	%		30,76 %	31	100,00
A	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam Persentase koperasi yang diberi penghargaan	17,94 % 12,82 %	0 % 0 %	17,94 % 12,82 %	% %		17,94 % 12,82 %		0,00 0,00
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	7 Unit Usaha	0 Unit Usaha	7 Unit Usaha	Unit Usaha		7 Unit Usaha	7	100,00
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	5 Unit Usaha	0 Unit Usaha	5 Unit Usaha	Unit Usaha		5 Unit Usaha	5	100,00

V	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang berikan pendidikan dan pelatihan	35,41 %	40 %	35,41 %	55 %	155,32	48,19 %	144	405,56
		Persentase Wirausaha yang berikan pendidikan dan pelatihan	0,57 %	3 %	0,57 %	0,34 %	59,65	0,61 %	4	624,56
A	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan perkoperasian	12,73 %	40 %	12,73 %	55 %	432,05	13,57 %	109	856,17
		- Persentase anggota koperasi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan perkoperasian	0,67 %	4 %	0,67 %	4,73 %	705,97	0,73 %	10	1482,09
	Peningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	110 Orang	932 Orang	110 Orang	521 Orang	473,64	120 Orang	1.573	1430,00
B	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase SDM yang Memahami Pengetahuan Kewirausahaan	0,06 %	0 %	0,06 %	0 %		0,06 %	0	94,18
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Kewirausahaan	100 wirausaha	0 wirausaha	100 wirausaha	wirausaha		100 wirausaha	100	100,00
C	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan SDM Usaha mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Persentase wirausaha yang dilatih	5,59 %	8 %	5,59 %	5,59 %	100,00	5,17 %	19	344,36
	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha Mikro	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	110 orang	160 orang	110 orang	80 orang	72,73	120 orang	360	327,27
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	13,89 %	18 %	13,89 %	45,16 %	325,13	17,64 %	81	583,15
A	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	2,31 %	12 %	2,31 %	54,15 %	2.344,16	3,39 %	70	3026,84
		- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,46 %	0 %	0,46 %	%	-	0,45 %	1	0
		- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan Kelembagaan	3,47 %	1 %	3,47 %	0 %	-	4,52 %	6	0,00
		- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan usaha	4,17 %	3 %	4,17 %	0 %	-	4,75 %	8	0,00
		- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan.	3,47 %	1 %	3,47 %	%	-	4,52 %	6	0,00
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bemilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60 koperasi	10 koperasi	60 koperasi	241 koperasi		78 koperasi	329	548,33
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	20 keluarga	0 keluarga	20 keluarga	keluarga		20 keluarga	20	100,00

VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	10,2 %	29 %	10,2 %	33,52 %	328,63	12,02 %	75	732,06
A	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	- Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	15,25 %	46 %	15,25 %	60,8 %	398,69	15,11 %	122	796,85
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	4 Unit Usaha	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	100,00	1 Unit Usaha	6	600,00
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	63 Unit Usaha	0 Unit Usaha	63 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	68 Unit Usaha	68	107,94
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	223 Unit Usaha	895 Unit Usaha	223 Unit Usaha	717 Unit Usaha	321,52	228 Unit Usaha	1.840	825,11
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50 Orang	702 Orang	50 Orang	50 Orang	100,00	50 Orang	802	1604,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM usaha Mikro dan kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30 orang	0 orang	30 orang	orang		30 orang	30	100,00
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio wirausaha berskala mikro naik kelas	0,66 %	1 %	0,66 %	0,66 %	100,00	0,77 %	2	345,45
A	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	pertambahan usaha mikro naik kelas	5 usaha mikro	204 usaha mikro	5 usaha mikro	5 usaha mikro	100,00	5 usaha mikro	214	4280,00
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	286 Unit Usaha	100 Unit Usaha	49 Unit Usaha	49,00	100 Unit Usaha	435	435,00
IX	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	62,25 %	0 %	62,25 %	%		70,05 %	70	112,53
A	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	62 %	0 %	62 %	%		71 %	71	114,52
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	260 dokumen	0 dokumen	260 dokumen	dokumen		249 dokumen	249	95,77
B	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Tanda Gudang Yang diterbitkan	47,65 %	0 %	47,65 %	%		56,56 %	57	118,70
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	25 dokumen	0 dokumen	25 dokumen	dokumen		35 dokumen	35	140,00

C	Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	100 %	0 %	100 %	%		100 %	100	100,00
	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	9 dokumen	0 dokumen	9 dokumen	dokumen		10 dokumen	10	111,11
D	Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba luar negeri	100 %	0 %	100 %	%		100 %	100	100,00
	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	2 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	dokumen		2 dokumen	2	100,00
E	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Minum di Tempat	100 %	0 %	100 %	%		100 %	100	100,00
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	dokumen		2 dokumen	2	100,00
F	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	100 %	0 %	100 %	%		100 %	100	100,00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	2 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	dokumen		2 dokumen	2	100,00
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 laporan	0 laporan	1 laporan	laporan		1 laporan	1	100,00
X	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengeloaan sarana distribusi perdagangan	47,41 %	145 %	47,41 %	99,15 %	209,13	48,28 %	292	616,24
A	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	- Sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	2 pasar	3 pasar	2 pasar	2 pasar	-	2 pasar	7	350,00
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	51 unit	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	53	5300,00
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	35 unit	48 unit	35 unit	58 unit	165,71	36 unit	142	405,71

B	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase jumlah pasar yang ada pengelola	58,62 %	117 %	58,62 %	68,96 %	117,64	60,34 %	246	419,98
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	48	400,00
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	36	300,00
XI	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Perkomoditas bahan pokok : a. Beras b. Tepung Terigu c. Telur d. Daging Ayam e. Gula Pasir f. Minyak Goreng	< 9 %	8 %	< 9 %	5,53 %	938,56	< 9 %	< 9	100
A	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok per komoditas a. Beras b. Tepung Terigu c. Telur d. Daging Ayam e. Gula Pasir f. Minyak Goreng	100 %	200 %	100 %	100 %	100,00	100 %	400	400,00
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 laporan	114 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00	12 laporan	138	1150,00
B	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas barang kebutuhan pokok yang dipantau harga dan stoknya	8 komoditas	27 komoditas	8 komoditas	11 komoditas	137,50	9 komoditas	47	587,50
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00	12 laporan	48	400,00
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 laporan	0 laporan	12 laporan	laporan		12 laporan	12	100,00
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	4	400,00
C	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi pupuk	44,61 %	0 %	44,61 %	81,6 %	182,92	52,24 %	134	300,02
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 laporan	0 laporan	12 laporan	laporan		12 laporan	12	100,00
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 laporan	0 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00	12 laporan	24	200,00

XII	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah nilai ekspor non Migas Per Tahun	Rp 11.343.317.813	Rp 26.198.799.731	Rp 11.343.317.813	Rp 21.290.914.999	187,70	Rp 12.477.429.594	59.967.144.324	528,66
A	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi dan misi dagang produk	78 pelaku usaha	144 pelaku usaha	78 pelaku usaha	44 pelaku usaha	56,41	47 pelaku usaha	235	301,28
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	40 pelaku usaha	45 pelaku usaha	40 pelaku usaha	40 pelaku usaha	100,00	40 pelaku usaha	125	312,50
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 pelaku usaha	3 pelaku usaha	3 pelaku usaha	pelaku usaha	-	4 pelaku usaha	7	233,33
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	6 pelaku usaha	0 pelaku usaha	6 pelaku usaha	pelaku usaha	-	8 pelaku usaha	8	133,33
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	4 pelaku usaha	18 pelaku usaha	4 pelaku usaha	4 pelaku usaha	100,00	5 pelaku usaha	27	675,00
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	2 Produk	0 Produk	2 Produk	Produk	-	3 Produk	3	150,00
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	23 pelaku usaha	620 pelaku usaha	23 pelaku usaha	pelaku usaha	-	26 pelaku usaha	646	2808,70
XII	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	68,33 %	102 %	68,33 %	27,28 %	39,92	70,41 %	199	291,60
A	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	2.235 UTTP	3.302 UTTP	2.235 UTTP	887 UTTP	39,69	2.310 UTTP	6.499	290,78
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2.235 Unit	4.517 Unit	2.235 Unit	887 Unit	39,69	2.310 Unit	7.714	345,15
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang		10 Orang	30	300,00
XIV	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan penggunaan Produk Lokal Kabupaten Sambas	7 %	7 %	7 %	%	-	7 %	14	200,00
A	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam	jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam promosi dan pemasaran	290 pelaku usaha	160 pelaku usaha	290 pelaku usaha	pelaku usaha	-	350 pelaku usaha	510	175,86
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40 UMKM	75 UMKM	40 UMKM	UMKM	-	50 UMKM	125	312,50
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	250 UMKM	20 UMKM	250 UMKM	UMKM	-	300 UMKM	320	128,00
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	dokumen		1 dokumen	1	100,00

XV	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase Pembinaan IKM	15,74 %	28 %	15,74 %	12,62 %	80,18	16,64 %	28	179,42
A	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase sumber daya IKM yang Dibina	12,37 %	25 %	12,37 %	12,23 %	98,87	13,25 %	54	432,66
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	4	400,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	4	400,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	4	400,00
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	2	
XVI	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pembinaan Perizinan Kegiatan Usaha Industri Kewenangan Kabupaten	22,85 %	6 %	22,85 %	8,33 %		24,67 %	39	171,03
A	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	- Persentase izin kegiatan usaha industri kewenangan kabupaten yang diterbitkan (tahun berjalan)	15,82 %	62 %	15,82 %	7,03 %		21,09 %	90	566,50
		- Persentase pengawasan izin kegiatan usaha industri kewenangan kabupaten yang diterbitkan	7,03 %	5 %	7,03 %	4,02 %		8,79 %	18	256,61
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	3	300,00
XVII	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase perusahaan industri yang menyampaikan data ke SIINas	8,79 %	2 %	8,79 %	3,71 %		10,89 %	16	183,16
A	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan industri kewenangan kabupaten yang menyampaikan data ke SIINas	50 perusahaan	8 perusahaan	50 perusahaan	37 perusahaan		75 perusahaan	120	240,00
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	3	300,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima (5) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021 – 2026. Indikator ini menguraikan tingkat pencapaian dengan mengiakan tolok ukur kinerja pemerintahan yang dikemukakan baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif, sehingga program dan kegiatan dapat dijalankan.

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SAMBAS

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET					REALISASI					CAPAIAN				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya perkembangan koperasi sehat	Persentase Koperasi Aktif	42,82	43,91	45,17	48,35	49,89	44,55	46,97				104,04	106,97	0,00	0,00	0,00
3	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Persentase pertumbuhan usaha mikro	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	7,35	13,29				1148,44	2013,64	0,00	0,00	0,00
4	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	10	11	12	13	14	23,31	12,89				233,10	117,18	0,00	0,00	0,00
5	Meningkatnya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	7,85	5,53				112,78	138,56	0,00	0,00	0,00
6	Meningkatnya perkembangan ekspor	Persentase pertumbuhan nilai Ekspor non migas	10	12	14	16	18	12.200,90	27				122.009,00	225,00	0,00	0,00	0,00
7	Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase Pertumbuhan Industri	10,80	10,97	11,35	11,51	11,79	20,07	18,78				185,83	171,19	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa

1) Persentase Koperasi Aktif

Capaian kinerja indikator Persentase Koperasi aktif pada tahun 2022 sebesar 104,04%, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 106,97 %, dapat dikategorikan sangat berhasil.

2) Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro

Capaian kinerja indikator Persentase pertumbuhan usaha Mikro tahun 2022 sebesar 1.148,44%, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 2.013,64% dapat dikategorikan sangat berhasil.

3) Persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas

Capaian kinerja indikator persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas pada tahun 2022 sebesar 333,50%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 117,18% dapat dikategorikan berhasil.

4) Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu

Capaian kinerja indikator Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu pada tahun 2022 sebesar 112,78%, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 138,56% dapat dikategorikan berhasil.

5) Persentase pertumbuhan nilai Ekspor non migas

Capaian kinerja indikator Persentase pertumbuhan nilai Ekspor non migas pada tahun 2022 sebesar 112.009%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 225% dapat dikategorikan sangat berhasil.

6) Persentase Pertumbuhan Industri

Capaian kinerja indikator Persentase pertumbuhan industri pada tahun 2022 sebesar 185,83%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 171,19 % dapat dikategorikan sangat berhasil.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1) Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas masih menghadapi beberapa permasalahan, yaitu:

a. Bidang Koperasi

- Kemampuan manajerial pengelola koperasi masih rendah
- Kurangnya kemampuan koperasi untuk memenuhi keperluan akan sarana dan prasarana usaha
- Terbatasnya informasi jaringan pemasaran dan akses permodalan bagi koperasi
- Masih lemahnya jaringan distribusi pemasaran produk
- Jumlah koperasi yang bergerak di sektor real masih rendah.

b. Bidang Usaha Mikro

- Belum optimalnya sinergisitas program kegiatan antar dinas terkait untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- Kemampuan manajerial pengelola usaha mikro masih rendah
- Kurangnya kemampuan usaha mikro untuk memenuhi keperluan akan sarana dan prasarana usaha
- Terbatasnya informasi jaringan pemasaran dan akses permodalan bagi usaha mikro
- Masih lemahnya jaringan distribusi pemasaran produk
- Rendahnya keterkaitan UMKM kepada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi dan usaha.

c. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan

- Terdapat bangunan pasar yang baik dan atau rusak ringan, namun tidak digunakan karena lokasi bangunan yang dianggap kurang strategis, sehingga tidak ada pedagang yang memanfaatkan dan akibatnya tidak dapat dipungut retribusinya.

- Masih Rendahnya kesadaran pedagang dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi tempat usaha. Kondisi ini diperparah dengan masih banyaknya pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak dilakukan retribusi.
- Belum optimalnya, pengelola pasar disebabkan tidak ada pengelola pasar yang ditunjuk untuk memudahkan monitoring, pelola kebersihan, listrik, air dan lain – lain.
- Belum maksimalnya pemanfaatan gudang SRG.
- Ketersediaan fasilitas dan sarana fisik serta pengelolaan pasar tradisional masih kurang.

d. Bidang Perdagangan

- Perdagangan luar negeri /ekspor Kabupaten Sambas masih didominasi oleh produk-produk hulu berupa komoditas pertanian.
- Penyalahgunaan perdagangan tradisional lintas batas yang memberikan dampak negatif terhadap perdagangan dalam negeri (masuknya bahan pangan ilegal dari negara tetangga ke Kabupaten Sambas bahkan KALBAR seperti gula) dan industri dalam negeri (masuknya bokar ke negara tetangga).
- Masih rendahnya pengetahuan pengusaha/pedagang tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perdagangan khususnya peraturan tentang ekspor.
- Masih rendahnya kepedulian masyarakat sebagai konsumen terhadap pelanggaran dan peredaran barang – barang yang tidak layak edar sebagai laporan terhadap pelanggaran tersebut masih sangat rendah.
- Masih rendahnya perhatian dan kerjasama pedagang terhadap kebijakan pemerintah daerah.
- Masih lemahnya pengawasan terhadap ketersediaan dan pengendalian harga barang-barang pokok dan barang penting lainnya.
- Terbatasnya ketersediaan informasi komoditi perdagangan yang berpotensi untuk diekspor

- Promosi produk unggulan daerah masih sangat terbatas dan belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal
- Dampak covid-19 terhadap ekspor Kabupaten Sambas.

e. Bidang UPTD Metrologi Legal

- Luasnya wilayah kerja UPTD ML, ditambah dengan kondisi geografis yang beragam memberikan hambatan pada pelaksanaan pendataan potensi UTTP (alat ukur timbang takar dan perlengkapannya). Kondisi ini semakin berat dikarenakan SDM Kemetrolagian yang minim (2PNS, 1 Honorer) dan sarana mobilitas yang sudah tua.
- Belum terdapat petugas pengawas Kemetrolagian yang mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban tera dan tera ulang alat UTTPnya.
- Tidak tersedianya mobilitas yang memadai untuk menjangkau daerah-daerah dengan medan yang berat tetap memiliki potensi UTTP yang besar.
- Kurangnya SDM yang berkopeten dibidang kemetrolagian sehingga pelaksanaan hal-hal yang tertuang dalam dokumen mutu menemui kesulitan.
- Standar ukuran yang belum dapat diverifikasi disebabkan oleh banyaknya standar kerja yang harus diverifikasi dan terbatasnya anggaran untuk memverifikasi semua standar ukuran.

f. Bidang Perindustrian

- Minimnya pengetahuan para pelaku usaha terhadap perubahan peraturan perizinan online (OSS) berbasis resiko
- Masih banyak pelaku IKM yang belum melakukan registrasi perizinan ke akun SIINAS.
- Masih terbatasnya pengetahuan pelaku IKM dalam mengakses regulasi perizinan berusaha berbasis resiko (OSSRBA)
- Terbatasnya kemampuan SDM pelaku IKM dalam aspek manajemen usaha sehingga belum memiliki orientasi business.

- Belum optimalnya kompetensi SDM pelaku IKM dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk hilirisasi
- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana teknologi untuk proses hilirisasi produk
- Belum optimalnya pemanfaatan digital marketing untuk promosi dan pemasaran produk
- Terbatasnya kompetensi SDM IKM dalam aspek standarisasi kualitas sehingga daya saing produk belum optimal
- Pembinaan dan pengawasan perijinan masih belum optimal

2) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas memberikan beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembangan selama lima tahun ke depan.

a. Peluang (*opportunities*)

Pengembangan kerjasama antarkawasan dan antarnegara secara lebih luas dan nyata seperti Indonesia–Malaysia–Singapore–Growth Triangle (IMS-GT) dan Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP EAGA) akan memperluas peluang investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;

b. Tantangan / Ancaman (*Treaths*)

1. Globalisasi membawa dampak yang dapat menjadi ancaman bagi Kabupaten Sambas, yaitu:
 - a. Krisis ekonomi dan keuangan pada negara-negara tujuan ekspor atau menjadi mitra dagang Indonesia akan membawa dampak pada perekonomian daerah;
 - b. Pemberlakuan Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Area) meningkatkan arus masuk barang dan jasa dari pasar

internasional yang berdampak pada determinasi pasar lokal (daerah) dan pasar dalam negeri;

- c. Arus informasi yang bersifat negatif semakin sulit dibendung akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi sehingga dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat di daerah;
- d. Globalisasi akan menguntungkan negara-negara yang memiliki daya saing tinggi.

2. Masih terdapat peraturan perundang-undangan yang bersifat kontraproduktif terhadap jalannya proses pelaksanaan pembangunan di daerah.

3) Formulasi Isu Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis bagi PD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi PD di masa lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a) Pembinaan koperasi yang lebih fokus pada koperasi aktif, karena sulitnya berkomunikasi dengan pengurus koperasi yang sudah tidak aktif. Keadaan semakin sulit karena anggota koperasi yang tidak aktif juga merupakan anggota pasif yang tidak responsif terhadap kondisi yang sedang dialami oleh koperasinya.
- b) Berpindahnya sebagian pengurus dan anggota koperasi ke aktivitas usaha sendiri yang lebih menjanjikan, sehingga pengurus terbebas dari birokrasi rapat pengurus dan rapat anggota.

- c) Efisiensi dan daya saing yang sulit ditingkatkan sehingga koperasi kalah bersaing dengan pelaku usaha lainnya yang terus menerus meningkatkan kualitas produk.
- d) Terbatasnya dukungan infrastruktur yang menyebabkan aktivitas koperasi terganggu perkembangannya sehingga menyebabkan pengurus tidak termotivasi mengembangkan usaha. Hingga saat ini masih sering terjadi pemadaman listrik oleh PLN di Kabupaten Sambas, padahal ketersediaan listrik merupakan faktor utama dalam menjalankan aktivitas usaha. Disamping ketersediaan pasokan listrik, kualitas dan kuantitas jalan juga sangat menentukan.
- e) Perubahan fungsi lahan dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke perkebunan yang memaksa sebagian koperasi pertanian kehilangan aktivitas.
- f) Laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan akibat dampak pandemi covid 19
- g) Masih lemahnya jaringan informasi pemasaran, permodalan dan distribusi produk
- h) Pencapaian jumlah nilai ekspor yang turun drastis yang disebabkan adanya regulasi akibat dampak pandemi covid - 19
- i) Pelaksanaan pelayanan Metrologi Legal belum optimal karena kurangnya sarana prasarana penunjang serta keterbatasan tenaga yang berkualifikasi
- j) Keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan pelaku UMKM sehingga akses pemasaran dan alih teknologi terbatas.
- k) Keterbatasan kapasitas SDM pelaku IKM dalam penggunaan teknologi informasi sehingga akses pemasaran (online dan offline) dan alih teknologi menjadi terbatas.
- l) Masih terdapat bangunan pasar yang tidak layak untuk ditempati.

- 4) Penyelarasan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 dan Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

Pada tanggal 2-5 April 2024 telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun Tahun 2024 – 2026 dan Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan dengan menyepakati salah satunya Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD antara lain :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PD Tahun 2025
1.	Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan Modern	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	3%
2.	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	5,5%
		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	0,34%
		Pertumbuhan Wirausaha	3%

- 5) Penyelarasan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 dan Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan SDM Provinsi Kalimantan Barat.

Pada tanggal 4-5 April 2024 telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun Tahun 2024 – 2026 dan Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan SDM Provinsi Kalimantan Barat yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan dengan menyepakati salah satunya Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2024 disusun berdasarkan atas Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dan membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJM Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, dengan arahan Kepala Daerah terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas harus dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah yaitu Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis perdesaan, dan Peningkatan peluang investasi dan penciptaan peluang kerja di tahun 2025. Sehingga dalam mendukung pencapaian kebijakan tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdapat 17 program, 31 kegiatan, dan 66 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
8. Program Pengembangan UMKM

9. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
10. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
11. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
12. Program Pengembangan Ekspor
13. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
14. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
15. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
16. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
17. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Secara lengkap Review terhadap rancangan Awal RKPD tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas dapat dilihat pada Tabel-C.31, dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel T-C.31											
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL											
RKPD TAHUN 2025											
KABUPATEN SAMBAS											
NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	5.282.589.777	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	5.282.589.777	
A	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	14 dokumen	68.000.000	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	14 dokumen	68.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	20.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	8.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	8.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	8.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	8.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	8.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	8.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	8.000.000	
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan	17 dokumen	4.163.933.860	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan	17 dokumen	4.163.933.860	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/ Bulan	3.764.997.860	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/ Bulan	3.764.997.860	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	368.936.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	368.936.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 laporan	10.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	10.000.000	
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	10.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	10.000.000	

C	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	42 orang	115.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	42 orang	115.000.000	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	10.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	10.000.000	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	60.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	60.000.000	
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	10.000.000	
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	35.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	35.000.000	
D	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah unit organisasi yang dilayani pengadministrasian umumnya	7 unit organisasi	331.600.417	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah unit organisasi yang dilayani pengadministrasian umumnya	7 unit organisasi	331.600.417	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.563.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.563.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	24.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	24.000.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.468.925	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.468.925	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	53.568.492	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	53.568.492	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 dokumen	15.000.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 laporan	135.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 laporan	135.000.000	
E	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit organisasi yang disediakan barang penunjang urusan pemerintah daerah	7 unit organisasi	160.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit organisasi yang disediakan barang penunjang urusan pemerintah daerah	7 unit organisasi	160.000.000	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	50.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	50.000.000	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit		
3	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	25.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	25.000.000	
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	30.000.000	
5	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	15.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	15.000.000	
6	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	5.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	5.000.000	
7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	10.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	10.000.000	
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	20.000.000	
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	5.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	5.000.000	

F	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit organisasi yang disediakan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	7 unit organisasi	282.425.500	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit organisasi yang disediakan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	7 unit organisasi	282.425.500	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3.500.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	142.357.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	142.357.500	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	6.000.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	130.568.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	130.568.000	
G	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	161.630.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	161.630.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	40.240.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	40.240.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	35.650.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	35.650.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 unit	24.460.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 unit	24.460.000	
4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 unit	15.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 unit	15.000.000	
5	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	5.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	5.000.000	
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26.280.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26.280.000	
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	15.000.000	
II	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase pelayanan izin KSP/USP	18,18 %	120.000.000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase pelayanan izin KSP/USP	18,18 %	120.000.000	
A	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi	17,94 %	60.000.000	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi	17,94 %	60.000.000	
1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit Usaha	60.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit Usaha	60.000.000	
B	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penerbitan izin pembukaan kantor pusat kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam	20 %	60.000.000	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penerbitan izin pembukaan kantor pusat kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam	20 %	60.000.000	
1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor		Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	1 Unit Usaha	60.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan		Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	1 Unit Usaha	60.000.000	

III	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	6,64 %	185.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	6,64 %	185.000.000	
A	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		- Persentase Koperasi, Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang dilakukan pengawasan	3,98 %	185.000.000	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		- Persentase Koperasi, Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang dilakukan pengawasan	3,98 %	185.000.000	
			- Persentase Koperasi, Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang dilakukan pemeriksaan	2,65 %				- Persentase Koperasi, Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang dilakukan pemeriksaan	2,65 %		
1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit Usaha	90.000.000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit Usaha	90.000.000	
2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	12 Unit Usaha	95.000.000	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	12 Unit Usaha	95.000.000	
IV	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP		Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	33,33 %	150.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP		Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	33,33 %	150.000.000	
A	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	20,51 %	150.000.000	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	20,51 %	150.000.000	
			Persentase koperasi yang diberi penghargaan	12,82 %				Persentase koperasi yang diberi penghargaan	12,82 %		
1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	8 Unit Usaha	90.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	8 Unit Usaha	90.000.000	
2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	5 Unit Usaha	60.000.000	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	5 Unit Usaha	60.000.000	
V	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Koperasi yang berikan pendidikan dan pelatihan	61,5 %	400.000.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Koperasi yang berikan pendidikan dan pelatihan	61,5 %	400.000.000	
			Persentase Wirausaha yang berikan pendidikan dan pelatihan	0,66 %				Persentase Wirausaha yang berikan pendidikan dan pelatihan	0,66 %		
A	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		- Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan perkoperasian	14,38 %	180.000.000	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		- Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan perkoperasian	14,38 %	180.000.000	
			- Persentase anggota koperasi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan perkoperasian	0,78 %				- Persentase anggota koperasi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan perkoperasian	0,78 %		
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	130 Orang	180.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	130 Orang	180.000.000	

B	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten / Kota		Persentase SDM yang Memahami Pengetahuan Kewirausahaan	0,06 %	35.000.000	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten / Kota		Persentase SDM yang Memahami Pengetahuan Kewirausahaan	0,06 %	35.000.000	
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Kewirausahaan	100 wirausaha	35.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Kewirausahaan	100 wirausaha	35.000.000	
C	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan SDM Usaha mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota		Persentase wirausaha yang dilatih	4,78 %	185.000.000	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan SDM Usaha mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota		Persentase wirausaha yang dilatih	4,78 %	185.000.000	
1	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan	130 orang	185.000.000	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan	130 orang	185.000.000	
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	21,68 %	170.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	21,68 %	170.000.000	
A	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	4,42 %	170.000.000	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	4,42 %	170.000.000	
			- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,44 %				- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,44 %		
			- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan Kelembagaan	5,53 %				- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan Kelembagaan	5,53 %		
			- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan	5,75 %				- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan	5,75 %		
			- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan.	5,53 %				- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan.	5,53 %		
1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	98 Unit Usaha	155.000.000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	98 Unit Usaha	155.000.000	
2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya		Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	20 keluarga	15.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya		Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	20 keluarga	15.000.000	
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	14,06 %	300.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	14,06 %	300.000.000	
A	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		- Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	16,21 %	300.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		- Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	16,21 %	300.000.000	

1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah data potensi dan pengembangan usaha mikro	1 dokumen	50.000.000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah data potensi dan pengembangan usaha mikro	1 dokumen	50.000.000	
2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	73 Unit Usaha	50.000.000	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	73 Unit Usaha	50.000.000	
3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	233 Unit Usaha	65.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	233 Unit Usaha	65.000.000	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50 Orang	95.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50 Orang	95.000.000	
5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM usaha Mikro dan kewirausahaan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30 orang	40.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM usaha Mikro dan kewirausahaan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30 orang	40.000.000	
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Rasio wirausaha berskala mikro naik kelas	0,84 %	350.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Rasio wirausaha berskala mikro naik kelas	0,84 %	350.000.000	
A	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil		pertambahan usaha mikro naik kelas	5 usaha mikro	350.000.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil		pertambahan usaha mikro naik kelas	5 usaha mikro	350.000.000	
1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	350.000.000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	350.000.000	
X	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	77,22 %	214.850.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	77,22 %	214.850.000	
A	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	80 %	30.000.000	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	80 %	30.000.000	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	238 dokumen	30.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	238 dokumen	30.000.000	
B	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase Tanda Gudang Yang diterbitkan	67,92 %	26.000.000	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase Tanda Gudang Yang diterbitkan	67,92 %	26.000.000	
1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	45 dokumen	26.000.000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	45 dokumen	26.000.000	

C	Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	100 %		21.000.000	Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	100 %		21.000.000	
1	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	11 dokumen		21.000.000	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	11 dokumen		21.000.000	
D	Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri		Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba luar negeri	100 %		21.000.000	Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri		Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba luar negeri	100 %		21.000.000	
1	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri		Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	2 dokumen		21.000.000	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri		Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	2 dokumen		21.000.000	
E	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	100 %		25.500.000	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	100 %		25.500.000	
1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 dokumen		25.500.000	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 dokumen		25.500.000	
F	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	100 %		91.350.000	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	100 %		91.350.000	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	2 dokumen		25.500.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	2 dokumen		25.500.000	
2	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 laporan		65.850.000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 laporan		65.850.000	

XI	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	49,14 %	2.038.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	49,14 %	2.038.000.000	
A	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		- Sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	2 pasar	1.768.000.000	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		- Sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	2 pasar	1.768.000.000	
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	1.700.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	1.700.000.000	
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	37 unit	68.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	37 unit	68.000.000	
B	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase jumlah pasar yang ada pengelola	62,07 %	270.000.000	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase jumlah pasar yang ada pengelola	62,07 %	270.000.000	
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 dokumen	160.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 dokumen	160.000.000	
2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 dokumen	110.000.000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 dokumen	110.000.000	
XII	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Perkomoditas bahan pokok : a. Beras b. Tepung Terigu c. Telur d. Daging Ayam e. Gula Pasir f. Minyak Goreng	< 9 %	769.000.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Perkomoditas bahan pokok : a. Beras b. Tepung Terigu c. Telur d. Daging Ayam e. Gula Pasir f. Minyak Goreng	< 9 %	769.000.000	
A	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok per komoditas a. Beras b. Tepung Terigu c. Telur d. Daging Ayam e. Gula Pasir f. Minyak Goreng	100 %	85.000.000	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok per komoditas a. Beras b. Tepung Terigu c. Telur d. Daging Ayam e. Gula Pasir f. Minyak Goreng	100 %	85.000.000	
1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 laporan	85.000.000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 laporan	85.000.000	
B	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah komoditas barang kebutuhan pokok yang dipantau harga dan stoknya	10 komoditas	404.000.000	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah komoditas barang kebutuhan pokok yang dipantau harga dan stoknya	10 komoditas	404.000.000	
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	27.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	27.000.000	
2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 laporan	27.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 laporan	27.000.000	
3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	350.000.000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	350.000.000	

C	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase realisasi pupuk	59,87 %	280.000.000	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase realisasi pupuk	59,87 %	280.000.000	
1	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 laporan	160.000.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 laporan	160.000.000	
2	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 laporan	120.000.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 laporan	120.000.000	
XIII	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Jumlah nilai ekspor non Migas Per Tahun	Rp 13.725.172.553	435.580.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Jumlah nilai ekspor non Migas Per Tahun	Rp 13.725.172.553	435.580.000	
A	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi dan misi dagang produk	56 pelaku usaha	435.580.000	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi dan misi dagang produk	56 pelaku usaha	435.580.000	
1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	40 pelaku usaha	26.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	40 pelaku usaha	26.000.000	
2	Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 pelaku usaha	112.000.000	Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 pelaku usaha	112.000.000	
3	Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10 pelaku usaha	135.000.000	Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10 pelaku usaha	135.000.000	
4	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6 pelaku usaha	90.000.000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6 pelaku usaha	90.000.000	
5	Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi	4 Produk	36.580.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi	4 Produk	36.580.000	
6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	30 pelaku usaha	36.000.000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	30 pelaku usaha	36.000.000	
XIV	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	72,47 %	360.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	72,47 %	360.000.000	
A	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	2.385 UTTP	360.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	2.385 UTTP	360.000.000	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2.385 Unit	260.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2.385 Unit	260.000.000	
2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	10 Orang	100.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	10 Orang	100.000.000	
XV	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase peningkatan penggunaan Produk Lokal Kabupaten Sambas	7 %	207.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase peningkatan penggunaan Produk Lokal Kabupaten Sambas	7 %	207.000.000	
A	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam promosi dan pemasaran	410 pelaku usaha	207.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam promosi dan pemasaran	410 pelaku usaha	207.000.000	
1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	60 UMKM	75.000.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	60 UMKM	75.000.000	
2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	350 UMKM	82.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	350 UMKM	82.000.000	

3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 dokumen	50.000.000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 dokumen	50.000.000	
XVI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		persentase Pembinaan IKM	17,3 %	4.020.561.459	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		persentase Pembinaan IKM	17,3 %	4.020.561.459	
A	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase sumber daya IKM yang Dibina	13,94 %	4.020.561.459	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase sumber daya IKM yang Dibina	13,94 %	4.020.561.459	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	230.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	230.000.000	
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	630.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	630.000.000	
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	3.160.561.459	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	3.160.561.459	
4	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	dokumen		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	dokumen		
XVII	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Pembinaan Perizinan Kegiatan Usaha Industri Kewenangan Kabupaten	25 %	93.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Pembinaan Perizinan Kegiatan Usaha Industri Kewenangan Kabupaten	25 %	93.000.000	
A	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		- Persentase izin kegiatan usaha industri kewenangan kabupaten yang diterbitkan (tahun berjalan) - Persentase pengawasan izin kegiatan usaha industri kewenangan kabupaten yang diterbitkan	17,42 % 7,26 %	93.000.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		- Persentase izin kegiatan usaha industri kewenangan kabupaten yang diterbitkan (tahun berjalan) - Persentase pengawasan izin kegiatan usaha industri kewenangan kabupaten yang diterbitkan	17,42 % 7,26 %	93.000.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	93.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	93.000.000	
XVIII	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase perusahaan industri yang menyampaikan data ke SIINas	11,9 %	90.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase perusahaan industri yang menyampaikan data ke SIINas	11,9 %	90.000.000	
A	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan industri kewenangan kabupaten yang menyampaikan data ke SIINas	100 perusahaan	90.000.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan industri kewenangan kabupaten yang menyampaikan data ke SIINas	100 perusahaan	90.000.000	
1	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	90.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	90.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang sedang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sambas. Usulan program dan kegiatan ini berasal dari usulan masyarakat yang mengusulkan melalui Musrembang yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, sampai dengan tingkat Kabupaten Sambas, atau berdasarkan proposal program/kegiatan yang masuk ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Usulan program/kegiatan tersebut diinventarisasi dan dinilai antara kesesuaiannya berdasarkan nomenklatur baku yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan informasi usulan program/kegiatan yaitu jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan besaran volume kegiatan. Hasil inventarisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang memiliki kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya akan dipilah lagi berdasarkan prioritas, fokus kebijakan tahun 2025, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ingin dicapai, dan implikasi terhadap capaian renstra SKPD maupun terhadap RPJMD Kabupaten Sambas. Secara lengkap usulan program dan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T-C.32.

Tabel T-C.32

Hasil Pembahasan Usulan Kegiatan Pembangunan Pada Forum OPD Untuk Penyusunan Renja 2025

No. Prio	Usulan Kegiatan	Kode Rincian	Volume	Lokasi	Jumlah	Lokasi (Desa/Kec)		Keterangan	
1	DISETUJUI AKAN DIUSULKAN UTK DIDANAI DI APBD				6.067.500.000				
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					6.067.500.000				
1	Pengadaan Mesin Jahit dan Pelatihan	020.022-013	15 Unit	Desa Gugah Sejahtera	30.000.000	GUGAH SEJAHTERA	PEMANGKAT	1	Setuju
1	Pelatihan Menjahit dan kerajinan tangan	030.035-018	1 Kali	Desa Maribas	50.000.000	MARIBAS	TEBAS	1	Setuju
1	Pengembangan sarana dan prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	030.044-011	10 Kelompok	Desa Sungai Kelambu	100.000.000	SUNGAI KELAMBU	TEBAS	1	Setuju
1	Pengadaan Mesin Jahit dan Obras untuk kelompok PKK dan Pelatihan	030.046-014	1 Paket	Desa Pangkalan Kongsu	30.000.000	PANGKALAN KONGSI	TEBAS	1	Setuju
1	Pelatihan Kelompok Perempuan Usaha Mikro	030.051-024	1 Paket	Desa Sempalai	50.000.000	SEMPALAI	TEBAS	1	Setuju
1	PENGADAAN MESIN ROASTING KOPI	031.062-016	1 Unit	DESA SEMPADIAN	35.000.000	SEMPADIAN	TEKARANG	1	Setuju
1	Pengadaan Alat Sablon	040.065-009	1 Paket	Desa Sungai Rambah	30.000.000	SEI RAMBAH	SAMBAS	1	Setuju
1	Pengadaan Tenda Pedagang	040.075-023	10 Unit	Dalam Kaum	100.000.000	DALAM KAUM	SAMBAS	1	Setuju
1	Pelatihan Kelompok Tenun	040.076-035	5 Kelompok	Desa Tanjung Mekar	50.000.000	TANJUNG MEKAR	SAMBAS	1	Setuju
1	Pelatihan membuat makanan produk unggulan	043.102-022	20 Orang	DESA JIRAK	75.000.000	JIRAK	SAJAD	1	Setuju
1	Pengadaan Mesin Pemotong Kripik ubi dan nenas	062.162-075	1 Unit	Desa Semata	20.000.000	SEMETA	TANGARAN	1	Setuju
1	Pelatihan kelompok Perempuan	070.170-014	1 Paket	Desa Sepantai	10.000.000	SEPANTAI	SEJANGKUNG	1	Setuju
1	Pelatihan Keterampilan bidang ekonomi produktif dan Pengembangan Industri kecil level Desa	070.172-019	1 Paket	Desa Perigi Limus	100.000.000	PERIGI LIMUS	SEJANGKUNG	1	Setuju
2	Penunjang Kegiatan Promosi produk unggulan Desa	030.044-010	30 Orang	Desa Sungai Kelambu	100.000.000	SUNGAI KELAMBU	TEBAS	1	Setuju
2	Pelatihan Packing Produk Unggulan Desa	030.050-024	1 Paket	Desa Seberkat	15.000.000	SEBERKAT	TEBAS	1	Setuju
2	Pengadaan Alat dan Bahan Tenun Kain songket	040.076-034	5 Kelompok	Desa Tanjung Mekar	100.000.000	TANJUNG MEKAR	SAMBAS	1	Setuju

No. Prio	Usulan Kegiatan	Kode Rincian	Volume	Lokasi	Jumlah	Lokasi (Desa/Kec)		Keterangan	
2	pelatihan kerajinan menenun untuk usia remaja	040.081-014	1 Kegiatan	Desa Sumber Harapan	25.000.000	SUMBER HARAPAN	SAMBAS	1	Setuju
2	Gedung Koperasi BHINEKA JAYA	041.094-009	1 Unit	Desa Karaban Jaya	300.000.000	KARABAN JAYA	SUBAH	1	Setuju
2	Pelatihan Tenun / Peningkatan Kualitas Tenun	043.102-021	20 Orang	DESA JIRAK	100.000.000	JIRAK	SAJAD	1	Setuju
2	Pelatihan Ketrampilan Berwirausaha skala lokal untuk Perempuan Usaha kecil/Rumah tangga	043.105-032	1 Kegiatan	Desa Beringin	12.500.000	BERINGIN	SAJAD	1	Setuju
2	Pembangunan Pasar Rakyat	060.134-011	1 Paket	DESA TAMBATAN	100.000.000	TAMBATAN	TELUK KERAMAT	1	Setuju
2	Bantuan Pelatihan bagi UMKM	060.137-017	200 Orang	Desa Sekura	1.000.000.000	SEKURA	TELUK KERAMAT	1	Setuju
2	Pengadaan Mesin Obros dan jahit beserta pelatihannya	061.156-073	6 Unit	Desa galing	30.000.000	GALING	GALING	1	Setuju
2	Penunjang Kegiatan Promosi produk unggulan Desa	070.172-018	1 Paket	Desa Perigi Limus	100.000.000	PERIGI LIMUS	SEJANGKUNG	1	Setuju
2	Pembinaan Kewirausahaan Pemuda Perdesaan	080.183-033	1 Paket	Desa Kaliau'	200.000.000	KALIAU	SAJINGAN BESAR	1	Setuju
3	PENINGKATAN KAPASITAS KEWIRAUSAHAAN	010.005-010	34 Anggota	SUNGAI NYIRIH	25.000.000	SUNGAI NYIRIH	SELAKAU	1	Setuju
3	Pengadaan mesin jahit dan obras	021.026-003	1 Paket	Desa Sepinggan	100.000.000	SEPINGGAN	SEMPARUK	1	Setuju
3	Pelatihan Kerajinan Tangan Pada Kelompok Masyarakat / UMKM dan Koperasi	022.029-013	1 Paket	Desa Parit Baru	50.000.000	PARIT BARU	SALATIGA	1	Setuju
3	Pelatihan membuat produk unggulan Desa	030.035-021	1 Kali	Desa Maribas	50.000.000	MARIBAS	TEBAS	1	Setuju
3	Pengadaan Mesin Pencacah Kayu dan Pengemas serta Pelatihan Pengolahan dan Pengemasan	030.042-015	1 Paket	Desa Pusaka	200.000.000	PUSAKA	TEBAS	1	Setuju
3	Pelatihan Kerajinan Tangan	030.050-031	1 Paket	Desa Seberkat	10.000.000	SEBERKAT	TEBAS	1	Setuju
3	Pengadaan Pengolah santan dari Bahan Kelapa	031.063-032	3 Paket	Desa Cepala	150.000.000	CEPALA	TEKARANG	1	Setuju
3	Pelatihan Manajemen Koperasi/ UMKM	042.098-021	1 Paket	Desa Sebangun	25.000.000	SEBANGUN	SEBAWI	1	Setuju
3	PELATIHAN MENJAHIT DAN BANTUAN ALAT	051.126-007	10 Paket	MATANG TERAP	70.000.000	MATANG TERAP	JAWAI SELATAN	1	Setuju

No. Prio	Usulan Kegiatan	Kode Rincian	Volume	Lokasi	Jumlah	Lokasi (Desa/Kec)		Keterangan	
3	Pembangunan bangsal tempat pengrajin atau rumah pengrajin	070.176-017	3 Unit	Desa Parit Raja	300.000.000	PARIT RAJA	SEJANGKUNG	1	Setuju
3	Pengaaaan Mesin Jahit	070.181-022	10 Unit	Desa Sulung	50.000.000	SULUNG	SEJANGKUNG	1	Setuju
4	Pelatihan dan Bantuan Alat Pengolahan Ikan	020.021-025	1 Paket	Desa Sebatuan	150.000.000	SEBATUAN	PEMANGKAT	1	Setuju
4	Sosialisasi Pemberdayaan dan Pembentukan Koperasi	022.029-014	1 Paket	Desa Parit Baru	30.000.000	PARIT BARU	SALATIGA	1	Setuju
4	pelatihan membuat tahu dan tempe	030.043-005	2 Kali	Desa Mensere	75.000.000	MENSERE	TEBAS	1	Setuju
4	Peningkatan Kapasitas untuk Pelaku UMKM (Pelatihan Kewirausahaan)	040.074-016	1 Paket	Desa Lubuk Dagang	250.000.000	LUBUK DAGANG	SAMBAS	1	Setuju
4	Penambahan Modal Usaha UMKM (Peralatan Usaha Pembuatan Tahu)	041.090-005	1 Paket	Desa Mukti Raharja	75.000.000	MUKTI RAHARJA	SUBAH	1	Setuju
4	Pelatihan sablon bagi pemuda /pemudi	043.102-013	20 Orang	DESA JIRAK	80.000.000	JIRAK	SAJAD	1	Setuju
4	Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Desa Ratu Sepudak	061.152-004	1 Paket	Desa Ratu Sepudak	20.000.000	RATU SEPUDAK	GALING	1	Setuju
4	Pemberdayaan Pelaku UMKM (Pelatihan menjahit, pembuatan ayaman Pemanfaatan dari barang bekas dan alam) (PKK)	061.158-021	5 Kegiatan	Tri kembang	50.000.000	TRI KEMBANG	GALING	1	Setuju
4	sarana pendukung untuk pengemasan dan pemasaran bagi kelompok UMKM (dodol)	061.160-022	1 Paket	Desa Sijang	75.000.000	SIJANG	GALING	1	Setuju
4	Pengadaan Mesin Pengemasan Kripik ubi dan nenas	062.162-076	1 Unit	Desa Semata	10.000.000	SEMATA	TANGARAN	1	Setuju
4	Pelatihan dan pembinaan Keterampilan Kewirausahaan	070.172-017	1 Paket	Desa Perigi Limus	100.000.000	PERIGI LIMUS	SEJANGKUNG	1	Setuju
4	pemberian modal usaha pemuda / karang Taruna	080.185-028	10 Kelompok	Santaban	250.000.000	SANTABAN	SAJINGAN BESAR	1	Setuju
5	Pemeliharaan Pasar Desa Gelik	011.012-014	1 Paket	Desa Gelik	200.000.000	GELIK	SELAKAU TIMUR	1	Setuju
5	Pelatihan dan Pengadaan Mesin Jahit	020.021-026	1 Paket	Desa Sebatuan	150.000.000	SEBATUAN	PEMANGKAT	1	Setuju
5	Pengadaan Gerobak UMKM	021.027-006	20 Unit	Desa Semparuk	300.000.000	SEMPARUK	SEMPARUK	1	Setuju
5	pengadaan mesin jahit	022.033-015	16 Unit	DESA SERUNAI	80.000.000	SERUNAI	SALATIGA	1	Setuju
5	Pengadaan mesin jahit listrik (PKK)	030.037-020	6 Unit	Bukit Sigoler	30.000.000	BUKIT SEGOLER	TEBAS	1	Setuju

No. Prio	Usulan Kegiatan	Kode Rincian	Volume	Lokasi	Jumlah	Lokasi (Desa/Kec)		Keterangan	
5	Pelatihan dan Pembinaan Perempuan Usaha Mikro dan Pengadaan Sarana Prasarannya (Pembuatan dan Pengemasan) dan Pelatihan Keripik Pisang	030.041-015	1 Paket	Desa Segedong	50.000.000	SEGEDONG	TEBAS	1	Setuju
5	pelatihan pengelolaan buah jeruk menjadi minuman siap saji	030.043-006	1 Kali	Desa Mensere	50.000.000	MENSERE	TEBAS	1	Setuju
5	Pelatihan Menjahit	030.050-026	1 Paket	Desa Seberkat	15.000.000	SEBERKAT	TEBAS	1	Setuju
5	Pelatihan UMKM	030.055-017	1 Paket	Desa Mekar Sekuntum	10.000.000	MEKAR SEKUNTUM	TEBAS	1	Setuju
5	Pengadaan Alat Packaging	040.072-012	1 Paket	Desa Pendawan	25.000.000	PENDAWAN	SAMBAS	1	Setuju
5	Pelatihan Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Pengolahan makanan Berbahan Pisang, Ubi Jalar, Ubi Kayu	050.112-020	1 Paket	Desa Parit Setia	100.000.000	PARIT SETIA	JAWAI	1	Setuju
5	Pelatihan Kewirausahaan / Pembinaan, Pemasaran Produksi Buah Naga	050.117-023	1 Paket	Desa Sungai Nilam	30.000.000	SEI NILAM	JAWAI	1	Setuju
5	Pelatihan Pengolahan Makanan dari Buah Naga	051.125-013	1 Kegiatan	Desa Sarilaba A	50.000.000	SARILABA A	JAWAI SELATAN	1	Setuju
5	PENGADAAN ALAT KEMASAN PRODUK RUMAH TANGGA	062.166-049	4 Unit	DESA PANCUR	20.000.000	PANCUR	TANGARAN	1	Setuju

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahap terakhir dari RPJPN 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di wilayah dan juga di dukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran pembangunan ini merupakan representasi dari 5 (lima) arahan utama Bapak Presiden selama lima tahun kedepan, yaitu: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1. Pembangunan SDM

Pembangunan SDM dilakukan dengan strategi peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas, dan pembangunan karakter sehingga tercipta SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Strategi dalam pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, energi dan ketenagalistrikan, dan teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi digital.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law (Penggabungan Beberapa Ketentuan Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya).

4. Penyederhanaan Birokrasi

Menyederhanakan birokrasi dengan memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi dilaksanakan dengan strategi penyederhanaan prosedur segala bentuk perizinan, penyelenggaraan e-government, dan reformasi birokrasi pelayanan public untuk kegiatan ekspor, impor, kepabeanan, dan kepelabuhan.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Strategi dalam transformasi ekonomi adalah Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global, pengembangan destinasi unggulan, dan penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

3.1.1. Tujuan dan Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM

3.3.1.1 Tujuan

Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yaitu:

“Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.”

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan

Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi;
 - b. Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC);
 - b. UMKM Naik Kelas (Scaling Up);
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

3.3.1.2. Sasaran

Sasaran strategis Pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan kondisi yang ingin dicapai sebagai suatu outcome dan impact dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Lebih lanjut, tujuan, sasaran dan indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

- a. Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif
- b. Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/ Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan
- c. Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM

- d. Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UKM
- e. Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi
- f. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik
- 1. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik

3.1.2 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

3.1.2.1 Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”.

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja utama, yaitu:

- a. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3% menjadi sebesar 8,4% pada tahun 2024; dan
- b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 17,8% menjadi sebesar 18,9% pada tahun 2024.
- c. Tenaga kerja di sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 19,2 juta orang menjadi sebanyak 22,5 juta orang pada tahun 2024.
- d. Nilai ekspor produk Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar US\$ 133,1 Miliar menjadi sebesar US\$ 181,6 Miliar pada tahun 2024.

3.1.3.2 Sasaran

- 1) Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas dengan indikator kinerja:
 - a. persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen menjadi sebesar 15,7 persen pada tahun 2024.
 - b. produktivitas tenaga kerja sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 111,8 Juta/Orang/Tahun menjadi sebesar Rp. 124,7 Juta/Orang/Tahun pada tahun 2024.
 - c. produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan antara 1,99 menjadi sebesar 2,15 pada tahun 2024.
 - d. nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 256,3 Triliun menjadi Rp. 769,1 Triliun pada tahun 2024.
 - e. persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen hasil riset menjadi sebesar 30 persen hasil riset pada tahun 2024.
 - f. persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan pada tahun 2020 sebesar 75 persen menjadi sebesar 88 persen pada tahun 2024.
 - g. lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi pada tahun 2020 sebanyak 36.000 orang menjadi sebanyak 157.000 orang pada tahun 2024.
- 2) Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0, dengan indikator kinerja:

- a. perusahaan dengan nilai Indonesia Industri 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 30 perusahaan menjadi sebesar 60 perusahaan pada tahun 2024.
 - b. kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 13 persen menjadi sebesar 13,7 persen pada tahun 2024.
 - c. tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi pada tahun 2020 sebanyak 20 IKM menjadi sebanyak 260 IKM pada tahun 2024.
 - d. sumber daya manusia industri 4.0 yang kompeten pada tahun 2020-2024 setiap tahun sebanyak 500 orang.
- 3) Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri, dengan indikator kinerja:
- a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 49 persen menjadi sebesar 53 persen pada tahun 2024.
 - b. persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 46,63 persen menjadi sebesar 52,48 persen pada tahun 2024.
 - c. produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 6.200 produk tersertifikasi menjadi sebanyak 8.400 produk tersertifikasi pada tahun 2024.
 - d. persentase SNI bidang industri yang diterapkan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024.
- 4) Meningkatnya penguasaan pasar industri, dengan indikator kinerja:

- a. pertumbuhan ekspor industri pengolahan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3 persen menjadi sebesar 10,1 persen pada tahun 2024.
 - b. kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 74,3 persen menjadi sebesar 76,5 persen pada tahun 2024.
 - c. rasio impor bahan baku industri terhadap PDB sektor industri nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 37,8 persen menjadi sebesar 36,8 persen pada tahun 2024.
 - d. penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 27 persen menjadi sebesar 32 persen pada tahun 2024.
- 5) Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan indikator kinerja:
- a. proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 18,60 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024.
 - b. wirausaha industri kecil yang tumbuh pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 4.000 wirausaha baru (WUB) menjadi sebanyak 20.000 WUB pada tahun 2024.
 - c. IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 50 IKM menjadi sebanyak 340 WUB pada tahun 2024.
 - d. proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM pada tahun 2020 sebesar 2,4 persen menjadi sebesar 5 persen pada tahun 2024.
- 6) Meningkatnya persebaran industri, dengan indikator kinerja:

- a. Kawasan industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 11 KI menjadi sebanyak 17 KI pada tahun 2024.
 - b. KI yang dikembangkan pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 18 KI menjadi sebanyak 33 KI pada tahun 2024.
 - c. fasilitasi KI dengan zona tematik (kawasan halal) pada tahun 2024 ditargetkan telah ada 3 KI.
 - d. persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa sebesar 29,9 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 33,1 persen pada tahun 2024.
 - e. sentra industri kecil dan menengah (SIKIM) di luar Jawa yang beroperasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 17 sentra menjadi sebanyak 44 sentra pada tahun 2024.
- 7) Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif, dengan indikator kinerja : efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 72 persen menjadi 80 persen pada tahun 2024.
- 8) Terselenggaranya urusan pemerintahan yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
- a. perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 33 perusahaan menjadi sebanyak 71 perusahaan pada tahun 2024.
 - b. infrastruktur kompetensi industri setiap tahun ditargetkan sebanyak 20 SKKNI mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.
- 9) Terciptanya pengawasan internal yang efektif dan efisien, dengan indikator kinerja:
- a. batas toleransi temuan pengawasan eksternal pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1,5 persen menjadi sebesar 1 persen pada tahun 2024.

- b. rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker ditargetkan sebesar 91 persen menjadi sebesar 93 persen pada tahun 2024.
 - c. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan pada level 3 menjadi level 4 pada tahun 2024.
- 10) Terwujudnya ASN profesional & berkepribadian, dengan indikator kinerja :
- a. indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 70 menjadi sebesar 80 pada tahun 2024.
 - b. ASN yang meningkat kompetensinya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 500 orang menjadi 700 orang pada tahun 2024.
- 11) Terwujudnya sistem informasi industri yang berkualitas, dengan indikator kinerja:
- a. tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan (skala 4) pada tahun 2020 sebesar skala 3 menjadi skala 3,18 pada tahun 2024.
 - b. tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik pada tahun 2020 ditargetkan selalu 100 persen pada tahun 2020-2024.
- 12) Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja:
- a. tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN selalu ditargetkan memperoleh WTP mulai tahun 2020 sampai tahun 2024.
- 13) indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 78 menjadi sebesar 80 pada tahun 2024.

3.1.3. Telaah Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

3.1.3.1 Tujuan

Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 - 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;

untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Adapun yang menjadi indikator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Neraca Perdagangan (USD Miliar)	0,3	1,0	3,0	7,5	15,0

- 2) Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi;

melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk

pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Adapun yang menjadi indikator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor (%)	4,5	4,8	5,3	5,6	6,0

- 3) Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas; melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan. Adapun yang menjadi indikator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	76	78	80	83	85

3.1.3.2 Sasaran

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020-2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah:

- Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
- Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
- Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
- Meningkatnya pasar produk dalam negeri;

- e. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
- f. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional; dan
- g. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor - faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*). Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Bupati. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kabupaten Sambas mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Sambas secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026, yaitu:

***“Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian,
Maju dan Berkelanjutan”***

3.2.1. Tujuan

1. Meningkatnya perkembangan koperasi
2. Meningkatnya perkembangan usaha kecil dan menengah
3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah
4. Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah

3.2.2. Sasaran

1. Meningkatnya perkembangan koperasi sehat
2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan
3. Meningkatnya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Meningkatnya Perkembangan Ekspor
5. Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan
6. Meningkatnya pertumbuhan industri

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk Tahun 2025 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (PD)
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas**

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR		Target 2025
1	Meningkatnya perkembangan koperasi	Meningkatnya perkembangan koperasi sehat	1.	Persentase koperasi aktif	48,35%
2.	Meningkatnya perkembangan usaha kecil dan menengah	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	2.	Pesentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0,70%
3.	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah	Meningkatnya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	3.	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	<9%
		Meningkatnya perkembangan ekspor	4.	Persentase pertumbuhan nilai Ekspor Non Migas	16%
		Meningkatnya pertumbuhan peningkatan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	5.	Persentase pertumbuhan peningkatan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	13%
4.	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Meningkatnya pertumbuhan industri	6.	Persentase Pertumbuhan Industri	11,51%

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Adapun program dan kegiatan pada tahun 2025 dapat di lihat pada tabel T-C.33 di bawah ini :

Tabel T-C.33										
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025										
Kabupaten Sambas										
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kab. Sambas	100 %	4.994.761.981	DAU		100 %	5.282.589.777	
2.17.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	Kab. Sambas	14 dokumen	68.000.000	DAU		14 dokumen	68.000.000	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sambas	4 dokumen	20.000.000	DAU		4 dokumen	20.000.000	
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sambas	1 dokumen	8.000.000	DAU		1 dokumen	8.000.000	
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sambas	1 dokumen	8.000.000	DAU		1 dokumen	8.000.000	
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sambas	1 dokumen	8.000.000	DAU		1 dokumen	8.000.000	
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sambas	1 dokumen	8.000.000	DAU		1 dokumen	8.000.000	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sambas	1 dokumen	8.000.000	DAU		1 dokumen	8.000.000	
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sambas	5 dokumen	8.000.000	DAU		5 dokumen	8.000.000	
2.17.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Kab. Sambas	17 dokumen	3.944.432.191	DAU		17 dokumen	4.163.933.860	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sambas	35 orang/ Bulan	3.545.496.191	DAU		35 orang/ Bulan	3.764.997.860	
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sambas	1 dokumen	368.936.000	DAU		1 dokumen	368.936.000	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	Kab. Sambas	1 laporan	10.000.000	DAU		1 laporan	10.000.000	
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sambas	2 laporan	10.000.000	DAU		2 laporan	10.000.000	
2.17.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sambas	2 dokumen	10.000.000	DAU		2 dokumen	10.000.000	

2.17.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	Kab. Sambas	41 orang	115.000.000	DAU		42 orang	115.000.000
2.17.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sambas	2 unit	10.000.000	DAU		2 unit	10.000.000
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Sambas	1 Paket	60.000.000	DAU		1 Paket	60.000.000
2.17.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sambas	4 Dokumen	10.000.000	DAU		4 Dokumen	10.000.000
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sambas	7 orang	35.000.000	DAU		7 orang	35.000.000
2.17.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit organisasi yang dilayani pengadministrasian umumnya	Kab. Sambas	7 unit organisasi	290.926.490	DAU		7 unit organisasi	331.600.417
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sambas	1 Paket	22.563.000	DAU		1 Paket	22.563.000
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sambas	1 Paket	6.000.000	DAU		1 Paket	6.000.000
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Sambas	1 Paket	23.500.000	DAU		1 Paket	24.000.000
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sambas	1 Paket	57.607.490	DAU		1 Paket	75.468.925
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sambas	1 Paket	45.000.000	DAU		1 Paket	53.568.492
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Sambas	25 dokumen	15.000.000	DAU		25 dokumen	15.000.000
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sambas	90 laporan	121.256.000	DAU		95 laporan	135.000.000
2.17.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit organisasi yang disediakan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Sambas	7 unit organisasi	140.000.000	DAU		7 unit organisasi	160.000.000
2.17.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Sambas	unit		DAU		2 unit	50.000.000
2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sambas	2 unit	40.000.000	DAU		unit	
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sambas	10 unit	20.000.000	DAU		10 unit	25.000.000
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sambas	2 unit	25.000.000	DAU		3 unit	30.000.000
2.17.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Sambas	1 unit	15.000.000	DAU		1 unit	15.000.000
2.17.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kab. Sambas	1 unit	5.000.000	DAU		1 unit	5.000.000
2.17.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sambas	1 unit	10.000.000			1 unit	10.000.000
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sambas	2 unit	20.000.000	DAU		2 unit	20.000.000
2.17.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sambas	1 unit	5.000.000	DAU		1 unit	5.000.000

2.17.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit organisasi yang disediakan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Sambas	7 unit organisasi	274.773.300	DAU		7 unit organisasi	282.425.500
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sambas	1 laporan	3.000.000	DAU		1 laporan	3.500.000
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sambas	1 laporan	141.417.300	DAU		1 laporan	142.357.500
2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sambas	1 laporan	5.000.000	DAU		1 laporan	6.000.000
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sambas	1 laporan	125.356.000	DAU		1 laporan	130.568.000
2.17.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Sambas	100 %	161.630.000	DAU		100 %	161.630.000
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sambas	1 unit	40.240.000	DAU		1 unit	40.240.000
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sambas	1 unit	35.650.000	DAU		1 unit	35.650.000
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Sambas	34 unit	24.460.000	DAU		34 unit	24.460.000
2.17.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sambas	5 unit	15.000.000	DAU		5 unit	15.000.000
2.17.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Sambas	1 unit	5.000.000	DAU		1 unit	5.000.000
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sambas	1 Unit	26.280.000	DAU		1 Unit	26.280.000
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sambas	13 unit	15.000.000	DAU		13 unit	15.000.000
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase pelayanan izin KSP/USP	Kab. Sambas	18,18 %	110.000.000	DAU		18,18 %	120.000.000
2.17.02.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi	Kab. Sambas	17,94 %	55.000.000	DAU		17,94 %	60.000.000
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	7 Unit Usaha	55.000.000	DAU		7 Unit Usaha	60.000.000
2.17.02.2.02	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin pembukaan kantor pusat kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam	Kab. Sambas	20 %	55.000.000	DAU		20 %	60.000.000
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	1 Unit Usaha	55.000.000	DAU		1 Unit Usaha	60.000.000

2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	Kab. Sambas	6,11 %	167.000.000	DAU		6,64 %	185.000.000
2.17.03.2.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	- Persentase Koperasi, Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang dilakukan pengawasan	Kab. Sambas	3,62 %	167.000.000	DAU		3,98 %	185.000.000
		- Persentase Koperasi, Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang dilakukan pemeriksaan	Kab. Sambas	2,49 %		DAU		2,65 %	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	10 Unit Usaha	83.000.000	DAU		10 Unit Usaha	90.000.000
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Kab. Sambas	11 Unit Usaha	84.000.000	DAU		12 Unit Usaha	95.000.000
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Kab. Sambas	30,76 %	140.000.000	DAU		33,33 %	150.000.000
2.17.04.2.01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	Kab. Sambas	17,94 %	140.000.000	DAU		20,51 %	150.000.000
		Persentase koperasi yang diberi penghargaan	Kab. Sambas	12,82 %				12,82 %	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Sambas	7 Unit Usaha	85.000.000	DAU		8 Unit Usaha	90.000.000
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Kab. Sambas	5 Unit Usaha	55.000.000	DAU		5 Unit Usaha	60.000.000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang berikan pendidikan dan pelatihan	Kab. Sambas	48,19 %	295.000.000	DAU		61,5 %	400.000.000
		Persentase Wirausaha yang berikan pendidikan dan pelatihan	Kab. Sambas	0,61 %		DAU		0,66 %	
2.17.05.2.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan perkoperasian	Kab. Sambas	13,57 %	125.000.000	DAU		14,38 %	180.000.000
		- Persentase anggota koperasi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan perkoperasian	Kab. Sambas	0,73 %		DAU		0,78 %	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Sambas	120 Orang	125.000.000	DAU		130 Orang	180.000.000
2.17.05.2.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase SDM yang Memahami Pengetahuan Kewirausahaan	Kab. Sambas	0,06 %	35.000.000	DAU		0,06 %	35.000.000
2.17.05.2.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Kewirausahaan	Kab. Sambas	100 wirausaha	35.000.000	DAU		100 wirausaha	35.000.000
2.17.05.2.03	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan SDM Usaha mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Persentase wirausaha yang dilatih	Kab. Sambas	5,17 %	135.000.000	DAU		4,78 %	185.000.000
2.17.05.2.03.01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha Mikro	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kab. Sambas	120 orang	135.000.000	DAU		130 orang	185.000.000

2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Kab. Sambas	17,64 %	160.000.000	DAU	21,68 %	170.000.000
2.17.06.2.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	Kab. Sambas	3,39 %	160.000.000	DAU	4,42 %	170.000.000
		- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	Kab. Sambas	0,45 %		DAU	0,44 %	
		- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan Kelembagaan	Kab. Sambas	4,52 %		DAU	5,53 %	
		- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan usaha	Kab. Sambas	4,75 %		DAU	5,75 %	
		- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan.	Kab. Sambas	4,52 %		DAU	5,53 %	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	78 Unit Usaha	145.000.000	DAU	98 Unit Usaha	155.000.000
2.17.06.2.01.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Kab. Sambas	20 keluarga	15.000.000	DAU	20 keluarga	15.000.000
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Kab. Sambas	12,02 %	270.000.000	DAU	14,06 %	300.000.000
2.17.07.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	- Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Kab. Sambas	15,11 %	270.000.000	DAU	16,21 %	300.000.000
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah data potensi dan pengembangan usaha mikro	Kab. Sambas	1 dokumen	45.000.000	DAU	1 dokumen	50.000.000
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Sambas	68 Unit Usaha	40.000.000	DAK	73 Unit Usaha	50.000.000
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kab. Sambas	228 Unit Usaha	60.000.000	DAU	233 Unit Usaha	65.000.000
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Sambas	50 Orang	90.000.000	DAU	50 Orang	95.000.000
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM usaha Mikro dan kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kab. Sambas	30 orang	35.000.000	DAU	30 orang	40.000.000

2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio wirausaha berskala mikro naik kelas	Kab. Sambas	0,77 %	300.000.000	DAU		0,84 %	350.000.000
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	pertambahan usaha mikro naik kelas	Kab. Sambas	5 usaha mikro	300.000.000	DAU		5 usaha mikro	350.000.000
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Sambas	100 Unit Usaha	300.000.000	DAU		100 Unit Usaha	350.000.000
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Kab. Sambas	70,05 %	210.000.000	DAU		77,22 %	214.850.000
3.30.02.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Sambas	71 %	30.000.000	DAU		80 %	30.000.000
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Sambas	249 dokumen	30.000.000	DAU		238 dokumen	30.000.000
3.30.02.2.02	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Tanda Gudang Yang diterbitkan	Kab. Sambas	56,56 %	25.000.000	DAU		67,92 %	26.000.000
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kab. Sambas	35 dokumen	25.000.000	DAU		45 dokumen	26.000.000
3.30.02.2.03	Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Kab. Sambas	100 %	20.000.000	DAU		100 %	21.000.000
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Sambas	10 dokumen	20.000.000	DAU		11 dokumen	21.000.000
3.30.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba luar negeri	Kab. Sambas	100 %	20.000.000	DAU		100 %	21.000.000
3.30.02.2.04.01	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Kab. Sambas	2 dokumen	20.000.000	DAU		2 dokumen	21.000.000
3.30.02.2.05	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Kab. Sambas	100 %	25.000.000	DAU		100 %	25.500.000
3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Sambas	2 dokumen	25.000.000	DAU		2 dokumen	25.500.000
3.30.02.2.06	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	Kab. Sambas	100 %	90.000.000	DAU		100 %	91.350.000
3.30.02.2.06.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Kab. Sambas	2 dokumen	25.000.000	DAU		2 dokumen	25.500.000
3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Sambas	1 laporan	65.000.000	DAU		1 laporan	65.850.000

3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kab. Sambas	48,28 %	1.924.000.000	DAU		49,14 %	2.038.000.000
3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	- Sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	Kab. Sambas	2 pasar	1.665.000.000	DAU		2 pasar	1.768.000.000
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sambas	1 unit	1.600.000.000	DAU		1 unit	1.700.000.000
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sambas	36 unit	65.000.000	DAU		37 unit	68.000.000
3.30.03.2.02	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola	Persentase jumlah pasar yang ada pengelola	Kab. Sambas	60,34 %	259.000.000	DAU		62,07 %	270.000.000
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sambas	12 dokumen	159.000.000	DAU		12 dokumen	160.000.000
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sambas	12 dokumen	100.000.000	DAU		12 dokumen	110.000.000
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Perkomoditas bahan pokok : a. Beras b. Tepung Terigu c. Telur d. Daging Ayam e. Gula Pasir f. Minyak Goreng	Kab. Sambas	< 9 %	713.500.000	DAU		< 9 %	769.000.000
3.30.04.2.01	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok per komoditas a. Beras b. Tepung Terigu c. Telur d. Daging Ayam e. Gula Pasir f. Minyak Goreng	Kab. Sambas	100 %	85.000.000	DAU		100 %	85.000.000
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Sambas	12 laporan	85.000.000	DAU		12 laporan	85.000.000
3.30.04.2.02	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas barang kebutuhan pokok yang dipantau harga dan stoknya	Kab. Sambas	9 komoditas	371.500.000	DAU		10 komoditas	404.000.000
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	12 laporan	26.000.000	DAU		12 laporan	27.000.000
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Sambas	12 laporan	25.500.000	DAU		12 laporan	27.000.000
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	1 laporan	320.000.000	DAU		1 laporan	350.000.000
3.30.04.2.03	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi pupuk	Kab. Sambas	52,24 %	257.000.000	DAU		59,87 %	280.000.000
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Sambas	12 laporan	156.000.000	DAU		12 laporan	160.000.000
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Sambas	12 laporan	101.000.000	DAU		12 laporan	120.000.000

3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah nilai ekspor non Migas Per Tahun	Kab. Sambas	Rp 12.477.429.594	418.690.000	DAU		Rp 13.725.172.553	435.580.000
3.30.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi dan misi dagang produk	Kab. Sambas	47 pelaku usaha	418.690.000	DAU		56 pelaku usaha	435.580.000
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Kab. Sambas	40 pelaku usaha	25.000.000	DAU		40 pelaku usaha	26.000.000
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kab. Sambas	4 pelaku usaha	102.300.000	DAU		5 pelaku usaha	112.000.000
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran	Kab. Sambas	8 pelaku usaha	131.250.000	DAU		10 pelaku usaha	135.000.000
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kab. Sambas	5 pelaku usaha	89.000.000	DAU		6 pelaku usaha	90.000.000
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Kab. Sambas	3 Produk	36.000.000	DAU		4 Produk	36.580.000
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Kab. Sambas	26 pelaku usaha	35.140.000	DAU		30 pelaku usaha	36.000.000
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Kab. Sambas	70,41 %	346.870.000	DAU		72,47 %	360.000.000
3.30.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Kab. Sambas	2.310 UTTP	346.870.000	DAU		2.385 UTTP	360.000.000
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Sambas	2.310 Unit	256.870.000	DAU		2.385 Unit	260.000.000
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Sambas	10 Orang	90.000.000	DAU		10 Orang	100.000.000
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan penggunaan Produk Lokal Kabupaten Sambas	Kab. Sambas	7 %	203.500.000	DAU		7 %	207.000.000
3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam promosi dan pemasaran	Kab. Sambas	350 pelaku usaha	203.500.000	DAU		410 pelaku usaha	207.000.000
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	50 UMKM	73.000.000	DAU		60 UMKM	75.000.000
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kab. Sambas	300 UMKM	81.500.000	DAU		350 UMKM	82.000.000
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Sambas	1 dokumen	49.000.000	DAU		1 dokumen	50.000.000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase Pembinaan IKM	Kab. Sambas	16,64 %	3.876.801.772	DAU		17,3 %	4.020.561.459
3.31.02.2.01	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase sumber daya IKM yang Dibina	Kab. Sambas	13,25 %	3.876.801.772	DAU		13,94 %	4.020.561.459
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Sambas	1 dokumen	173.000.000	DAU		1 dokumen	230.000.000
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Sambas	1 dokumen	625.000.000	DAU		1 dokumen	630.000.000
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Sambas	1 dokumen	3.078.801.772	DAU		1 dokumen	3.160.561.459
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Sambas	dokumen		DAU		dokumen	

3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pembinaan Perizinan Kegiatan Usaha Industri Kewenangan Kabupaten	Kab. Sambas	24,67	%	90.000.000	DAU		25	%	93.000.000
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	- Persentase izin kegiatan usaha industri kewenangan kabupaten yang diterbitkan (tahun berjalan)	Kab. Sambas	21,09	%	90.000.000	DAU		17,42	%	93.000.000
		- Persentase pengawasan izin kegiatan usaha industri kewenangan kabupaten yang diterbitkan	Kab. Sambas	8,79	%		DAU		7,26	%	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	1	dokumen	90.000.000	DAU		1	dokumen	93.000.000
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase perusahaan industri yang menyampaikan data ke SIINas	Kab. Sambas	10,89	%	80.000.000	DAU		11,9	%	90.000.000
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan industri kewenangan kabupaten yang menyampaikan data ke SIINas	Kab. Sambas	75	perusahaan	80.000.000	DAU		100	perusahaan	90.000.000
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Sambas	1	dokumen	80.000.000	DAU		1	dokumen	90.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program – program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam

kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sambas namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN).

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITA S			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NA SIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program E-Governmen t	-		11.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program E-Governmen t	-		11.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program E-Governmen t	-		11.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	115.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program E-Governmen t	-	-	126.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program E-Governmen t	-		11.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	53.568.492,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program E- Governmen t	-		58.925.341,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				25 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program E- Governmen t	-		16.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi/ SKPD				95 Laporan	135.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program E- Governmen t	-		148.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	160.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program E- Governmen t	-	-	176.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program E- Governmen t	-		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA, ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program E- Governmen t	-		11.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA, ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program E- Governmen t	-		22.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA, ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program E- Governmen t	-		5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	282.425.500,00			-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program E- Governmen t	-	-	310.668.050,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA, ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program E- Governmen t	-		3.850.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				7 Unit Usaha	60.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-		66.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	60.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-	-	66.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit Usaha	60.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-		66.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-			-	185.000.000,00						-	203.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	185.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-	-	203.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				10 Unit Usaha	90.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-		99.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				12 Unit Usaha	95.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-		104.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-			-	150.000.000,00						-	165.000.000,00	Activat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-	-	165.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				8 Unit Usaha	90.000.000,00	Kab. Sambas, Semus Kecamatan, Semus Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-		99.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				5 Unit Usaha	60.000.000,00	Kab. Sambas, Semus Kecamatan, Semus Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-		66.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-			-	180.000.000,00						-	198.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tamban, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				98 Unit Usaha	105.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas in frastuktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-		115.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.06.2.01.0007		Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya				8 Unit Usaha	20.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas in frastuktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-		22.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.06.2.01.0008		Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya				30 Unit Usaha	20.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas in frastuktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-		22.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-			-	485.000.000,00						-	533.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	485.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-	-	533.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				68 Unit Usaha	30.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-		33.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				10 Unit Usaha	30.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-		33.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				10 Unit Usaha	30.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-		33.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				1 Unit Usaha	30.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-		33.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				30 Orang	185.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-		203.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-			-	350.000.000,00						-	385.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-			-	350.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas in frastuktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-	-	385.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Tersertifikasi				20 Unit Usaha	250.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas in frastuktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-		275.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				100 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas in frastuktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						8.227.991.459,00							9.050.990.604,00	
3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						4.024.430.000,00							4.427.073.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Distribusi/ Perdagangan				1 Unit	1.700.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-		1.870.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitas/ Pengelolaan Sarana Distribusi/ Perdagangan				37 Unit	68.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-		74.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi/ Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-			-	270.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-	-	297.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil/ Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi/ Perdagangan				12 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-		176.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi/ Perdagangan				12 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-		121.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-			-	765.000.000,00						-	845.500.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	85.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-	-	93.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	85.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-		93.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	404.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-	-	444.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	27.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-		29.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	27.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-		29.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	350.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-		385.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	280.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-	-	308.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				5 Pelaku Usaha	112.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas in frastuktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-		123.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				10 Pelaku Usaha	135.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas in frastuktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-		148.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				6 Pelaku Usaha	116.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas in frastuktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-		127.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				30 Produk	72.580.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas in frastuktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-		79.838.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-			-	360.000.000,00						-	396.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	360.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan OVOP (One Village One Product)	-	-	396.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Penengkapan Ditera Ulang				2385 Unit	260.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan OVOP (One Village One Product)	-		286.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				10 Orang	100.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan OVOP (One Village One Product)	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-			-	207.000.000,00						-	227.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	207.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-	-	227.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				50 Orang	50.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas/ Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				60 UMKM	75.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-		82.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas/ pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				350 UMKM	82.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-		90.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NA SIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi/ Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampalan Data ke SII/Nas				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkai an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Program P engembang an OVOP (One Village One Product)	-		77.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		J U M L A H						15.185.581.235,00								16.704.339.357,00	

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas tahun 2025 merupakan Rencana tahunan yang berisikan Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu setahun kedepan. Program/kegiatan yang direncanakan selama satu tahun kedepan merupakan turunan dari program-program yang ada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

5.2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip – prinsip efesiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025, dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretaris dan bidang.
2. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025, adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.
3. Rencana Kerja OPD, di dalam proses penyusunan harus memperhatikan/mempedomani dokumen – dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Sambas dan RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan yaitu :

- b. Sinergi multipihak dan koordinasi yang efektif, antar perangkat daerah dan pemerintah kabupaten serta pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan berbagai sektor.

- c. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai kebermanfaatan tinggi.
- d. Pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025 ini dibuat, semoga dapat tercapai dan dapat bermanfaat.

LAMPIRAN



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 329 /DISKUMINDAG/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah wajib menyusun rencana kerja sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 83);

11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 105);

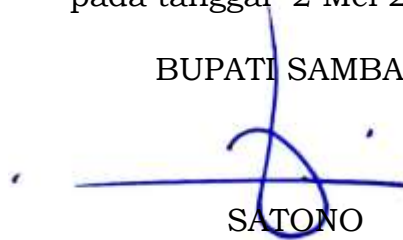
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas dan bertanggungjawab dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Mei 2024

BUPATI SAMBAS,



SATONO

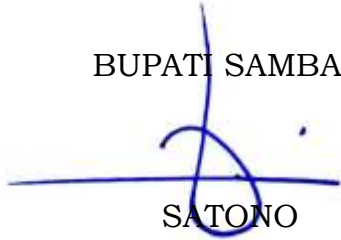
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 329/DISKUMINDAG/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025

No	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Ketua
2	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Sekretaris
3	1. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas 2. Sarkusi, SE/ Penyuluh Perindustrian dan Perdagngan Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas 3. Muizi, SE/ Pengawas dan Pemeriksa Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Koperasi
4	1. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas 2. Jani, ST/ Fasilitator Kewirausahaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Usaha Mikro
5	1. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas 2. Budi Aprianto, SP/ Pengawas Kemetrologian Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Perdagangan
6	1. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas 2. D.Hafiz Saprizal, S.IP/ Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Sarana Distribusi Perdagangan

No	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
7	1. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas 2. Eka Musrini, S.Hut.M.Hut/ Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas 3. Milwan Riswandi, S.Hut/ Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Perindustrian
8	Kepala UPTD Metrologi Legal	Kelompok Kerja UPTD Metrologi Legal
9	1. Kaharudin, SE/ Perencana Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas 3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Pengumpul Data dan Informasi
10	1. Vitanopiani, SP /Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas 2. Laila Kadariasih, S.I.Kom / Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Staf Sekretariat

BUPATI SAMBAS,


SATONO